

BAB V

PENUTUP

Robohnya bangunan ruang publik ideal, yang dilihat melalui kemandekan gerakan dalam pengorganisasian melalui piranti daring yang dilakukan oleh bidang Hikmah IMM Kota Semarang, merupakan suatu fenomena janggal yang terjadi di lapangan. Terdapat dua alasan utama mengapa hal ini bisa terjadi, yakni: *pertama* tampilnya organisasi ini sebagai rezim pengetahuan yang memproduksi wacana, sedangkan kader IMM Kota Semarang yang notabenenya penerima wacana dijadikan sebagai objek yang termarginalkan. Subjektivikasi ini tidaklah melalui perangkat fisik secara langsung, melainkan melalui penguasaan wacana, yang kemudian disebut-sebut sebagai wacana perlawanan. Mereka, rezim pengetahuan, menduduki posisi sebagai aktor dominan dalam diskursus tidak secara asal, tetapi melalui suatu proses strategi pendisiplinan yang kemudian dapat dinilai sebagai “*game of truth*”-nya mereka. Upaya tersebut disiasati mereka untuk menjadikan wacana perlawanan yang selama ini diproduksi sebagai suatu kebenaran yang, sebenarnya, belum tentu benar. *Kedua*, adanya ketidakselarasan selera antara wacana yang diproduksi dengan kader yang menerimanya. Bidang Hikmah acuh terhadap realita kondisi yang terjadi pada benak kader dengan memaksa seolah wacana yang diproduksi adalah sesuatu yang benar. Keacuhan ini tentu merupakan sinyalemen yang menandai adanya ketidakseriusan dan tidak adanya *political will* untuk mendealektikan antara habitus dan arena yang ada.

Bak buah simalakama, mereka yang tampil sebagai rezim pengetahuan dalam wacana yang diproduksinya, tidak lah seindah yang dibayangkan diawal. Alih-alih membangun kuasa dengan siasat pendisiplinan, regulasi dan normalisasi yang mereka lakukan demi memantapkan kuasanya justru berdampak pada resistensi kader. Regulasi yang mengharuskan adanya keterwakilan kader dari masing-masing komisariat misalnya, hanya berbuah sikap bungkamnya para kader. Sebab, apa yang selama ini digaungkan oleh bidang Hikmah cabang telah dinilai sesuatu yang *given* atau *taken for granted*. Padahal apa yang diwacanakan tidak selalu demikian benarnya.

Ini lah yang disebut sebagai “mitos keterwakilan”, dimana tidak ada lagi sesuatu yang dipertanyakan sebab menganggap adanya representasi telah mewakili makna kebenaran dari komisariat asal mereka. Upaya yang paling memungkinkan dilakukan kader adalah sikap resisten. Tetapi sikap untuk resisten tersebut hanyalah sebatas percobaan melawan yang itu pun tidak ditindaklanjuti tatkala ada normalisasi dengan penganuliran suara mereka yang dianggap berpotensi melakukan kontra-wacana. Hal ini disebabkan rezim pengetahuan dalam ruang diskursus tetap bermain dalam kepentingan politisnya. Mereka tidak rela jika harus menanggalkan wacana yang sudah dimapankannya dengan suatu diskusi. Aktor kuasa bersikukuh dengan wacana yang diproduksinya, sehingga dengan pemaksaan tersebutlah yang menjadikan sikap resisten kader dinilai sebagai sesuatu yang sia-sia. Artinya tidak ada pengaruhnya dengan apa yang dilakukan sang kuasa.

Implikasi terburuk selain adanya keterbungkaman kader adalah gagalnya rezim untuk membumikan wacana dan mandeknya gerakan selama masa

pandemi. Sebab, wacana perlawanan yang selama diproduksi hanya dapat menghasilkan dukungan partisipan tetapi tidak secara substansi. Para kader yang ikut mendukung hanyalah sebuah dukungan semu yang mana mereka tidak memahami betul seperti apa nalar dalam wacana ini. Mereka sekadar ikut-ikutan tanpa ada sebuah hasil yang memuaskan, bagi dirinya sendiri ataupun untuk bidang Hikmah cabang. Artinya, sebuah kekeliruan yang telah kami lakukan bahkan sejak awal wacana ini diproduksi. Wacana berhasil menduduki posisi yang dianggap “benar” tetapi gagal dimanfaatkan dan diambil manfaatnya. Lalu untuk apa ini semua? Ya, bagi saya ini adalah kesalahan dan sebuah tindakan yang sia-sia. Sebagai *think tank*, saya pun merasa bahwa ini semua adalah sebuah kesalahan yang fatal. Pengorganisasian daring selama masa pandemi seperti ini justru menjadi momok gelap organisasi.

Jika pun diminta saran, maka tidak ada sebuah saran yang berarti kecuali kita perlu melakukan tindakan lebih dengan percobaan atau eksperimentasi. Tentu tindakan tersebut didasarkan pada sebuah penggalian makna atas realita kondisi kader, misalnya dengan memahami kader sesuai dengan konteks era saat ini. Apa yang ada dibenak individu kader di era sekarang adalah partikel-partikel narasi yang kaya akan fantasi dan kesenangan. Pasalnya di era sekarang, sulit bagi seorang kader menerima suatu pemahaman baru yang sifatnya terlalu sulit dipahami, kaku, atau bahkan *high-risk*. Eksperimentasi berupa usaha memahami individu itu dapat kita mulai untuk mengeluarkan diri kita semua dari jeratan kejumudan (baca: kemandekan) sebab adanya penguasaan wacana. Meski tidak mungkin terlepas dari kuasa rezim pengetahuan, tetapi rekonstruksi ruang publik

dalam suatu diskursus tetap bisa diupayakan. Sebab, kita merujuk pada Foucault, makna “kuasa” bukanlah sesuatu yang mesti bernilai negatif melainkan netral, tergantung siapa aktor kuasa yang memaknainya.

Tatkala mencoba untuk belajar dari pengorganisasian gerakan daring lainnya, dengan memahami individu, maka ketemulah kita pada titik yang mencerahkan. Titik mencerahkan itu yang kemudian disebut sebagai pendekatan budaya populer. Singkatnya, pendekatan ini sangat lah simpel tetapi tidak juga remeh, yakni dengan mensubstitusikan gerakan kita dengan apa yang selama ini disenangi, digemari, diberhalakan, atau anggapan lainnya. Misalnya, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dengan memasukan unsur K-Pop dalam gerakan bagi penggemar K-Pop, unsur novel dalam gerakan bagi penggemar novel, atau unsur-unsur lainnya yang semua itu dekat dengan individu yang terlibat dalam pengorganisasian gerakan. Memang tidak mudah melakukan pendekatan ini, sebab penulis Skripsi ini pun selalu punya tendensi sebagai rezim pengetahuan. Politis juga jatuhnya. Tetapi apapun itu, pendekatan tersebut tidaklah mutlak dan tetap perlu menjadi refleksi bagi kita semua selaku “aktor” melalui sebuah diskursus yang akan terus berlanjut hingga *yaumul kiamah. Wallahu ‘alam.*